

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Skandal keuangan yang terjadi pada beberapa dekade terakhir telah mengurangi tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, permintaan terkait informasi tentang perusahaan meningkat secara signifikan (Septiana *et al.*, 2023). Perubahan global seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan dampak dari pandemi Covid-19 telah meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis serta membuat perusahaan menghadapi berbagai risiko dan membuat perusahaan harus mengerti serta memahami pengelolaan risiko yang lebih efisien dengan tujuan mengurangi kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan. Oleh karena itu, investor membutuhkan informasi terkait pengungkapan risiko sebelum pengambilan keputusan dalam melakukan investasi dan pendanaan pada perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia khususnya yang telah *go public* wajib menyampaikan informasi terkait aktivitas perusahaan melalui laporan tahunan (*annual report*). Laporan ini memuat berbagai informasi mengenai cara manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan oleh pemegang saham (investor).

Perusahaan dituntut untuk selalu transparan dalam menjalankan bisnisnya untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Transparansi ini dirancang untuk memastikan tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan demikian, suatu perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap, benar, tepat waktu, dan tanpa adanya pengungkapan yang tersembunyi. Laporan tahunan yang disajikan oleh suatu perusahaan menjadi sarana penyajian dan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Selain itu, berbagai informasi yang terkandung dalam laporan tahunan menjadi dasar untuk menganalisis situasi ketika menghadapi situasi yang tidak terduga dalam suatu operasi bisnis, situasi ini kemudian dikenal sebagai risiko.

Manajemen risiko adalah proses yang dipantau secara berkala dan berkelanjutan oleh pihak internal yang berwenang dengan merancang strategi organisasi yang diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan, sesuai dengan risiko yang dihadapi (Evana *et al.*, 2023). Pengungkapan manajemen risiko mengacu pada keterbukaan informasi yang dilakukan manajemen terkait pengendalian risiko yang muncul akibat aktivitas perusahaan. Pada dasarnya pengungkapan risiko dapat membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi berdasarkan prospek masa depan perusahaan. Apabila risiko diungkapkan secara rinci maka akan meningkatkan minat investor yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Pengungkapan informasi dapat juga berperan dalam mengurangi asimetri informasi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga investor dapat melakukan penilaian

perusahaan secara lebih akurat (Rahayu *et al.*, 2022). Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai strategi alternatif dalam mencapai tujuan perusahaan, di mana penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorate Governance*) akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (CRMS, 2019).

Penelitian menurut Hudaya *et al.*, (2021) mengenai pemetaan tingkat manipulasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Covid-19 menjelaskan bahwa dari 184 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia ditemukan 31 perusahaan atau 16,8% perusahaan yang melakukan manipulasi atas laporan keuangannya dan ditemukan 8 perusahaan atau 4,3% perusahaan yang beotensi dapat melakukan manipulasi atas laporan keuangannya pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesian selama tahun 2020 membawa dampak yang cukup besar bagi pelaku ekonomi. Banyak kesulitan yang dihadapi misalnya terjadinya penurunan penjualan yang signifikan karena daya beli masyarakat yang rendah, banyak proyek infrastruktur yang tidak jelas, kesulitan bahan baku akibat kebijakan pembatasan di Negara supplier bahkan di dalam negeri sendiri dan terhambatnya iklim investasi di berbagai sektor. Hal tersebutlah yang menjadi kemungkinan perusahaan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya agar para investor masih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

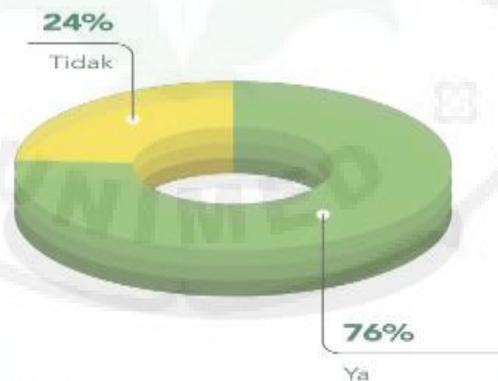
Beberapa kasus lain mengenai kegagalan manajemen risiko perusahaan yang berujung pada hilangnya kepercayaan investor salah satunya adalah kasus PT. Asuransi Jiwasraya. Perusahaan ini telah berdiri sejak era kolonial Belanda

dan memiliki sekitar 7 juta nasabah. Ribuan nasabah bergabung dalam program tersebut, menyebabkan premi asuransi yang diperoleh perusahaan meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun, produk JS *Saving Plan* memicu permasalahan serius ketika klaim-nya mulai jatuh tempo dan perusahaan mengalami gagal bayar pada bulan Oktober 2018. Gagal bayar ini terjadi karena perusahaan tidak memperoleh imbal hasil investasi asset yang sesuai ekspektasi, sementara jumlah klaim yang harus dibayarkan terus meningkat hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Seharusnya, PT. Asuransi Jiwasraya menerapkan manajemen risiko sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengancam kelangsungan perusahaan (IRMAPA, 2018).

PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) yang kini namanya berganti menjadi FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) merupakan salah satu emiten di industri *consumer goods* yang dikenal dengan nama TPS Food. Diketahui bahwa direksi TPS Food terlibat dalam praktik penggelembungan dana sebesar . 4 triliun terhadap laporan keuangan tahun 2017, dengan dugaan pembengkakan pendapatan sebesar . 662 miliar serta tambahan pendapatan lain di pos EBITDA sebesar . 329 miliar. PT Ernst & Young Indonesia (EY) juga melaporkan adanya aliran dana sebesar . 1,78 triliun dalam berbagai skema yang mengarah dari Group TPS Food kepada sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jajaran manajemen sebelumnya. Selain itu, ditemukan bahwa mekanisme pengungkapan transaksi dengan pihak terafiliasi tidak dilakukan secara transparan kepada *stakeholder*, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini mendorong pihak komisaris

untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas pergantian direksi (CNBC INDONESIA, 2017).

Berdasarkan informasi tersebut, muncul fenomena menarik bahwa secara keseluruhan banyak perusahaan belum mampu mengungkapkan penerapan manajemen risiko perusahaan secara wajar dan transparan. Masih terdapat sejumlah perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan agar tampak lebih menarik di mata para investor. Bahkan, beberapa perusahaan yang mengungkapkan risiko belum diperoleh upaya untuk meminimal risiko tersebut, sehingga seolah-olah kinerja dan reputasi perusahaan terlihat lebih baik dari kenyataannya.



**Gambar 1. 1**  
**Persentase Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan di Indonesia**

*Sumber:* [www.crmsindonesia.org](http://www.crmsindonesia.org)

Hasil Survey Nasional Manajemen Risiko 2019 menunjukkan bahwa tingkat penerapan manajemen risiko pada perusahaan di Indonesia sudah sebesar 76%. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan manajemen risiko, maka semakin banyak pula perusahaan yang mengungkapkan manajemen risiko (CRMS

Indonesia, 2019). Namun, pada praktiknya tingginya perusahaan yang menerapkan manajemen risiko tidak selalu berbanding lurus dengan transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko.

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Pengungkapan Manajemen Risiko**

No.	Nama Peneliti	RMD	Objek Penelitian
1.	Ardianto dan Rivandi (2018)	67%	Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2012-2016
2.	Elisabeth, <i>et al</i> (2020)	54%	Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2016-2018
3.	Fadilah dan Afriyenti (2020)	32%	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2018
4.	Linda Agustina, <i>et al</i> (2021)	66%	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2017-2020
5.	Nadira Ambarwati, <i>et al</i> (2021)	84%	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2017-2020

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada tabel 1.1 menunjukkan beberapa penelitian terkait pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia tahun 2012-2020. Ardianto dan Rivand (2018) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur periode 2012-2016 sebesar 67%. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Elisabeth, *et al* (2020) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur periode 2016-2018 sebesar 54%. Sedangkan penelitian yang dilakukan Riani Fadilah dan Mayar Afriyenti (2020) rata-rata pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur periode 2014-2018 hanya sebesar 32%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Linda Agustina, *et al* (2021), rata-rata pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur tahun 2017-2020 sebesar 66%. Dan penelitian yang dilakukan Nadira Ambarwati, *et al* (2021) rata-rata pengungkapan manajemen risiko di perusahaan manufaktur tahun 2017-2020

sebesar 84%. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak perusahaan yang menerapkan manajemen risiko, tidak semua perusahaan mengungkapkannya secara menyeluruh.

Pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih belum maksimal karena sifatnya yang sukarela, terutama pada perusahaan non keuangan seperti sektor manufaktur. Akibatnya, manajemen risiko yang diungkapkan menjadi kurang komprehensif. Situasinya bertolak belakang dengan perusahaan di sektor keuangan yang tunduk pada regulasi yang lebih ketat.

Fenomena pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan melalui dua teori utama yaitu teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi (keagenan) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (agen). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, di mana manajer berpotensi mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada pemegang saham. Menurut Rahayu *et al.*, (2022), mengungkapkan manajemen risiko diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi dan memberikan peluang bagi investor dalam hal efektivitas pengambilan keputusan dan menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan di masa depan.

Teori sinyal adalah salah satu teori yang mendasari masalah asimetri informasi. Teori ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan sinyal positif dan sinyal negatif guna mengurangi asimetri informasi. Menurut Sari *et al.*, (2022) teori sinyal mengungkapkan bahwa penerapan dan

pengungkapan manajemen risiko adalah salah satu sinyal yang disampaikan perusahaan kepada investor dan pemegang saham sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Adanya pelaporan manajemen risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan mencerminkan transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian pengungkapan manajemen risiko di Indonesia perlu ditingkatkan karena memuat informasi penting tentang pengungkapan risiko keuangan dan masih minimnya pemahaman tentang pengungkapan risiko (Mulyatno *et al.*, 2023). Kondisi ini mendorong perlunya analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan.

Fenomena ini tidak hanya didukung oleh penjelasan teoritis, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti empiris dari berbagai penelitian sebelumnya. Namun, hasil dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami pola dan faktor yang memengaruhi transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko. Hal ini diduga disebabkan karena penelitian terkait pengungkapan manajemen risiko selama ini hanya menguji model hubungan pengaruh langsung khususnya penelitian di Indonesia. Walaupun hubungan langsung ini mungkin dipengaruhi oleh penyebabnya, namun harus diperkuat dengan adanya variabel lain. Penelitian ini mengusulkan model yang menggunakan variabel moderasi yaitu komite manajemen risiko.

Komite manajemen risiko merupakan sebuah komite yang didirikan oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab langsung kepada mereka. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi serta memantau manajemen risiko di suatu perusahaan (Agustina *et al.*, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, komite manajemen risiko di Indonesia berkembang semakin pesat. Pemerintah mewajibkan pembentukan komite ini untuk mengawasi risiko, terutama di sektor perbankan dan badan usaha milik negara. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti PBI No.8/4/PBI/2006 dan Peraturan Menteri BUMN No.Per-10/MBU/2012. Dengan demikian, peran komite manajemen risiko dalam perusahaan di Indonesia menjadi sangat krusial, karena diharapkan mampu memperkuat praktik serta transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan manajemen risiko di Indonesia dan apa peran komite manajemen risiko dalam hal ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat berbagai variabel yang memengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengujian ulang variabel-variabel yang diduga dapat memengaruhi pengungkapan manajemen risiko tersebut yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit serta kepemilikan publik. Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar total aset suatu perusahaan, semakin tinggi pula minat investor untuk menanamkan modalnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evana *et al.*, (2023), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan

manajemen risiko. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Mulyatno *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh antara ukuran perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko secara lebih mendalam.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik. Namun, hal ini bisa berdampak negatif jika profitabilitas yang tinggi tidak disertai dengan transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko atau jika informasi terkait manajemen risiko tidak disajikan secara lengkap (Evana *et al.*, 2023). Hasil penelitian (Septiana *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Meski demikian, penelitian tersebut merekomendasikan agar variabel profitabilitas dikaji kembali dengan menggunakan indikator lain, seperti ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), ROI (*Return On Investment*), GPM (*Gross Profit Margin*) atau menggunakan seluruh indikator tersebut.

Dewan komisaris independen merupakan perwakilan perusahaan yang mengawasi direksi dalam mengelola kinerja dan kebijakannya. Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan transparansi suatu perusahaan (Septiana *et al.*, 2023). Berdasarkan hasil penelitian (Nahar & Azim, 2022) menunjukkan bahwa independensi dewan merupakan faktor kunci dalam pengungkapan manajemen risiko. Namun, hasil penelitian (Septiana *et al.*, 2023) menunjukkan

bahwa dewan komisaris independen tidak beengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam meninjau kinerja Direksi serta mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, semakin besar ukuran komite audit, semakin kuat pula pengawasan terhadap kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Evana *et al.*, 2023). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suzan & Zataymuni, (2023) menunjukkan bahwa komite audit tidak beengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Kepemilikan publik merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak eksternal perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh publik, semakin banyak pihak yang memerlukan informasi terkait risiko yang dihadapi perusahaan (Evana *et al.*, 2023). Hasil penelitian Wayan *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik beengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, berbanding terbalik pada hasil penelitian Evana *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak beengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

**Tabel 1. 2**  
**Research GAP**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian	Nama Peneliti
Pengungkapan Manajemen Risiko	Ukuran Perusahaan	Beengaruh	Evana <i>et al</i> , (2023)
		Tidak Beengaruh	Mulyatno <i>et al</i> , (2023)
	Profitabilitas	Beengaruh	Saskara <i>et al</i> , (2022)
		Tidak Beengaruh	Septiana <i>et al</i> , (2023)
	Dewan Komisaris Independen	Beengaruh	Nahar dan Azim (2021)
		Tidak Beengaruh	Septiana <i>et al</i> , (2023)
	Komite Audit	Beengaruh	Evana <i>et al</i> , (2023)
		Tidak Beengaruh	Suzan dan Zataymuni (2023)
	Kepemilikan Publik	Beengaruh	Wayan <i>et al</i> , (2017)
		Tidak Beengaruh	Evana <i>et al</i> , (2023)

Sumber: Data Diolah, 2024

Mengingat pentingnya pengungkapan manajemen risiko bagi perusahaan serta adanya *research gap* antara berbagai penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian kembali mengenai pengungkapan manajemen risiko. Penelitian ini akan memasukkan variabel moderasi, yaitu komite manajemen risiko dan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Pemilihan sektor manufaktur ini didasarkan pada karakteristiknya yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi dan kompleks dibandingkan dengan sector lainnya. Selain itu, pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non-keuangan, khususnya di sector manufaktur masih terbatas dan bersifat sukarela.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Dengan Komite Manajemen Risiko Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat fenomena manipulasi dan penggelembungan laporan keuangan di beberapa perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang mengindikasikan adanya ketidaktransparan dalam praktik pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas informasi yang disampaikan kepada para pemegang saham dan publik.
2. Adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau investor. Informasi yang tidak transparan atau tidak lengkap mengenai manajemen risiko dapat menghambat kemampuan investor untuk melakukan evaluasi yang akurat terhadap risiko investasi mereka.
3. Terdapat kecenderungan rendahnya praktik pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Meskipun terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan, pengungkapan mengenai manajemen risiko masih minim dan seringkali bersifat sukarela.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian terkait faktor-faktor pengungkapan manajemen risiko. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* untuk memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi praktik pengungkapan ini.
5. Penelitian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan variabel moderasi seperti komite manajemen risiko dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Hal ini

menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami peran komite manajemen risiko dalam konteks pengungkapan risiko perusahaan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memastikan ruang lingkup penelitian yang jelas dan lebih terfokus, penelitian ini akan membatasi cakupan analisis pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan publik. Selain itu, komite manajemen risiko akan digunakan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022, dengan pemilihan perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
2. Apakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
3. Apakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
4. Apakah pengaruh komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?

5. Apakah pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
6. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
7. Apakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
8. Apakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
9. Apakah pengaruh komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
10. Apakah pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
11. Secara simultan apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
2. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
3. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
4. Menguji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
5. Menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
6. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
7. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
8. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022

9. Menguji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
10. Menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan dimoderasi komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022
11. Menguji secara simultan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi dalam bidang keuangan, khususnya terkait pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya bukti empiris tentang bagaimana faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan publik mempengaruhi transparansi risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi buat peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian atau menguji variabel lain.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah:

### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan mengenai pentingnya penerapan *coorate governance* dalam pengungkapan risiko. Dengan memahami pentingnya transparansi informasi terkait risiko yang dihadapi, perusahaan dapat meningkatkan praktik pengungkapan manajemen risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis.

### b. Bagi Pengguna Informasi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, pemangku kepentingan dan investor tentang pemahaman mengenai bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan publik mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, terutama adanya peran moderasi dari komite manajemen risiko. Informasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi.